



ULAMA MINANGKABAU DI PENTAS SEJARAH TANAH DELI PADA ABAD 20 M

Samsul Bahri¹, Nursukma Suri², Suprayitno³
Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

samsulrodia@gmail.com¹, nursukma.suri@usu.ac.id², suprayitno@usu.ac.id³

Accepted: Dec, 18th 2024

Published: Jan, 17th 2025

Abstract

This research aims to determine the progress of Minangkabau ulama in Tanah Deli, especially in the 20th century AD. This research method was carried out through four stages, namely data collection (heuristics), source examination (verification), interpretation (interpretation), and writing (historiography). carried out based on field research and library research. The research results show that the presence of the Minangkabau ethnic group in Tanah Deli in the 20th century AD was inseparable from the impact of the open door political economy which made Tanah Deli a large economic area in the East Sumatra region. The economic growth in Tanah Deli has been able to attract migrants from various regions, including the Minangkabau ethnic group, to come to Tanah Deli. These Minangkabau ethnic migrants have always been identified with the Muhammadiyah organization because they had previously been influenced by Muhammadiyah when they were still in their hometown. Then when they were in Tanah Deli they made Muhammadiyah a gathering place for Minangkabau migrants who had a modernist religious style. However, for certain reasons their existence did not receive full political support from the Malay Sultanate or the Dutch East Indies government. However, the Minangkabau ethnic group has colored the history of Tanah Deli, especially in the religious sector, which is marked by the emergence of many big-name scholars from the Minangkabau ethnic group, namely Bustami Ibrahim, Hamka, Mahyaruddin Salim, Joesoef Sou'yb, Mansyur Luthan, Saldin Saleh, Djamaluddin Ahmad, Anas Nurdin, and Firdaus Naly.

Key words: *Minangkabau, Muhammadiyah, Tanah Deli, Modernist*

How to Cite: Bahri. S., Suri. N., Suprayitno (2025) Ulama Minangkabau di Pentas Sejarah Tanah Deli Abad 20 M. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (63-71)

*Corresponding author:
samsulrodia@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Menarik apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon, M.Sc. ketika menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 4 November 2017 yang lalu dengan judul Pengaruh Budaya Minangkabau dalam Melahirkan Tokoh Nasional. Fadli mengutip disertasi Elizabeth Graves sejarawan dari Cornell University yang berjudul *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century* yang mengatakan bahwa meskipun populasi Minangkabau hanya 3 persen dari total populasi penduduk Indonesia tetapi etnis Minangkabau adalah kelompok masyarakat yang paling besar kontribusinya dalam mengisi lingkaran elit politik, intelektual, dan kelompok profesional lainnya di Indonesia. Kemudian Fadli juga mengutip catatan dari budayawan A. A. Navis yang menyebutkan bahwa dari 377 tokoh dan orang terkemuka di Indonesia pada tahun 1956, maka 71 diantaranya adalah orang Minangkabau.

Karena kontribusinya yang begitu besar ditengah masyarakat maka tidak mengherankan jika etnis Minangkabau senantiasa menjadi sorotan di kehidupan sosial maupun di lingkungan akademisi. Mereka selalu menarik untuk dikaji karena memiliki kultur yang dinamis yang bisa dilihat dari keberanian mereka menghadapi pertarungan hidup meninggalkan kampung halamannya, memiliki etos kerja yang tinggi, serta semangat menjalankan agama. Budaya merantau begitu melekat kepada orang Minangkabau sehingga tidak mengherankan jika persentase antara Minangkabau perantau dengan Minangkabau yang ada di Sumatera Barat jumlahnya hampir seimbang. Tercatat data BPS tahun 2018 penduduk Minangkabau di Sumatera Barat lebih kurang 5 juta jiwa sedangkan yang merantau kurang lebih 4 juta orang (Nurdin dan Rido, 2020: 9).

Jika dikerucutkan dari sekian kiprah tersebut masyarakat etnis Minangkabau ternyata memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Indonesia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari hubungan agama dan etnisitas Minangkabau yang selalu identik dengan Islam sehingga tidak ada orang Minangkabau yang tidak beragama Islam. Jika demikian adanya maka etnis Minangkabau sama dengan beberapa etnis lain di Indonesia sebut saja ada Aceh, Gayo, Singkil, Melayu, atau Banjar. Oleh karenanya jika mereka keluar dari

Islam, maka secara otomatis akan lepas pula status kesukuannya sebagai orang Minangkabau (Bahri, 2022: 210).

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi destinasi perantauan orang Minangkabau adalah kota Medan yang dikenal dengan sebutan Tanah Deli. Perantauan mereka sudah dimulai sejak era kolonial Belanda utamanya abad 20 M. Ketika itu Kesultanan Deli masih eksis dan kuat. Begitu juga daerah ini dikenal sebagai negeri petro dollar karena melimpahnya hasil perkebunan tembakau yang tersohor sampai ke dunia Internasional. Bahkan jauh sebelum abad ke 20 menurut catatan J. Karl Pelzer ternyata perkebunan di Sumatera Timur sudah jauh berkembang. Misalnya perkebunan karet tahun 1870 hanya 2.240 hektar menjadi 580.000 hektar di tahun 1939. Perkebunan teh pada tahun 1915 hanya 3.237 hektar menjadi 21.588 hektar di tahun 1938. Perkebunan sawi pada tahun 1915 hanya 3.294 hektar menjadi 92.307 hektar di tahun 1938 (Pelly, 2017: 64).

Tentunya sebagai muslim yang identik dengan perniagaan maka ketika di Tanah Deli kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari Islam. Masyarakat Minangkabau sedikit banyaknya telah mewarnai kehidupan keagamaan di Tanah Deli. Banyak ulama dari etnis Minangkabau yang muncul ke permukaan yang namanya cukup harum di tengah masyarakat pada zamannya. Bahkan sebagian kecil mereka masih aktif berkiprah sampai abad ke 21 M. Satu hal yang memang harus diakui bahwa masyarakat etnis Minangkabau kala itu selalu dikait-kaitkan dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Apalagi di era kolonial perkembangan Muhammadiyah sangat pesat di Minangkabau yang dibawa oleh Syaikh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) sepulangnya dari pulau Jawa tahun 1925. Mereka-mereka para ulama Minangkabau yang telah banyak berkiprah di pentas sejarah Tanah Deli pada abad ke 20 M adalah Bustami Ibrahim, Hamka, Mahyaruddin Salim, Joesoef Sou'yb, Mansyur Luthan, Saldin Saleh, Djamaluddin Ahmad, Anas Nurdin, dan Firdaus Naly.

METHODOLOGY

Salah satu aspek yang paling penting dari sebuah penelitian ilmiah adalah adanya seperangkat metode yang akan digunakan. Tanpa adanya metode mustahil itu disebut sebagai kegiatan ilmiah. Metode juga dikaitkan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Madjid dan Madjid, 2011:

40). Dalam penelitian ini akan menggunakan metode yang biasa dipakai dalam penelitian ilmu sejarah yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah proses pencarian, pelacakan, maupun pengumpulan sumber-sumber sejarah yang diperlukan dalam mendukung proses rekonstruksi sejarah.

Dalam penelitian ini sumber yang digunakan terdiri dari dua jenis yakni primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan baik keluarga maupun murid-murid yang mengetahui peri hidup ulama Minangkabau yang ada di Tanah Deli sebagaimana yang dimaksud. Hasil wawancara ini nantinya akan ditambah dengan studi dokumen, arsip, atau gambar-gambar yang berkaitan. Adapun yang menjadi sumber sekundernya adalah beberapa tulisan/referensi yang sudah ada sebelumnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karenanya penelitian ini memadukan antara penelitian lapangan (field research) dengan penelitian kepustakaan (library research).

Sumber yang sudah dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dipilih dan diseleksi (verifikasi) dan yang pakai adalah semua yang dianggap relevan saja dengan penelitian. Semua sumber yang sudah diverifikasi akan diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan analisa yang mendalam untuk selanjutnya nanti dapat dituangkan dalam proses penulisan (historiografi). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui proses wawancara (terstruktur dan bebas) dengan informan dan studi literatur dari berbagai tulisan yang sudah ada. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini sepenuhnya di lakukan di kota Medan.

RESULT AND DISCUSSION

Perkembangan kota Medan atau Tanah Deli pada abad ke 20 M tidak terlepas dari pengaruh politik yang dibuat pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu pemerintah kolonial menilai bahwa sistem ekonomi tanam paksa yang bersifat ortodoks tidaklah bisa dipertahankan lagi. Oleh karenanya perlu membuat kebijakan politik dibidang ekonomi dengan menawarkan konsep ekonomi yang lebih lentur tetapi keuntungan yang diperoleh masih tinggi. Inilah yang kemudian disebut dengan sistem ekonomi pintu terbuka (open

door policy) pada tahun 1870. Pada saat itu diterbitkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) dan Undang-Undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang yang baru ini dibuat sebagai legitimasi untuk melaksanakan politik ekonomi pintu terbuka yang mengizinkan masuknya investasi yang tidak hanya dari kalangan pengusaha Belanda tetapi siapa saja para pemilik modal boleh menjadi investor di Hindia Belanda. Jika melihat prosesnya yang lebih panjang ide ini sebetulnya sudah dirintis sejak tahun 1860 an.

Meskipun regulasi ada tetapi pemerintah kolonial masih merasa ada yang kurang apalagi saat itu perekonomian bertumpu pada sektor pertanian. Oleh karenanya pengambil kebijakan merasa perlu mencari lahan baru untuk mengembangkannya. Di Eropa sendiri geliat ekonomi sedang meningkat, banyak tanaman yang harus diusahakan karena sedang laris-larisnya di pasaran seperti sawit, teh, kelapa, sisel, karet, dan kakao. Oleh karenanya pemerintah Hindia Belanda perlu secepatnya mengupayakan tersedianya lahan yang luas tidak hanya di wilayah taklukan tetapi juga non taklukan. Di Sumatera Timur pemerintah kolonial melakukan kontrak politik melalui konsesi perkebunan yang perjanjiannya terus diperbaharui. Tercatat di Kesultanan Asahan sebanyak tiga kali tanggal 23 Agustus 1907, 22 Maret 1913, 11 Oktober 1916, dan 28 Juli 1920. Kesultanan Deli sebanyak 2 kali tanggal 2 Juni 1907 dan 14 Oktober 1913. Kesultanan Kualu Ledong sebanyak 4 kali tanggal 23 September 1907, 25 Maret 1913, 22 Oktober 1916, dan 28 Juli 1920. Kesultanan Langkat sebanyak 3 kali tanggal 6 Juni 1907, 27 Maret 1913, dan 14 Oktober 1916. Kesultanan Pelelawan sebanyak 3 kali tanggal 29 Desember 1906, 9 April 1913, dan 20 Oktober 1916. Kesultanan Serdang sebanyak 4 kali tanggal 11 Juni 1907, 14 Maret 1910, 29 Mei 1913, dan 11 Oktober 1916 dan Kesultanan Siak sebanyak 1 kali yaitu tanggal 25 Mei 1916 (Zein, dkk. 2021: 21).

Kebijakan politik ekonomi terbuka ini ibarat magnet yang mampu menarik para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Sumatera Timur khususnya di Tanah Deli. Ketika itu Tanah Deli menjadi ramai dari kunjungan investor, tenaga kerja, maupun para perantau yang ingin mengadu nasibnya. Pada periode pertama para pemilik modal mendatangkan para pekerja dari kalangan Tionghoa yang berasal dari Singapura dan

Penang. Tercatat jauh sebelumnya perusahaan Deli Maatschapaij sudah memulai dengan membawa 900 orang China dari Penang pada tahun 1869 dan pada tahun 1872 terus bertambah sehingga jumlah mereka menanjak hingga melebihi 4000 orang (Sinar, 2010: 6).

Ada serbuan investor dan tenaga kerja, maka sudah pasti akan mendatangkan para perantau umum dari berbagai macam daerah dan etnis. Salah satu etnis yang pendatang yang cukup banyak jumlahnya di Tanah Deli adalah kelompok Minangkabau. Etnis ini identik dengan budaya perantau yang memiliki etos kerja yang cukup tinggi dan memilih mandiri karena tidak memasuki sektor perkebunan sebagai ikon perekonomian utama di Tanah Deli. Jika merujuk pada fakta sejarah sebetulnya mereka bisa juga memasuki sektor perkebunan mengingat pada perjalanannya ternyata tenaga-tenaga kerja kalangan China secara bertahap memilih untuk keluar dari perkebunan. Selain upah yang terlalu murah juga adanya eksploitasi SDM yang di luar dari nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan sebagiannya diberlakukan hukuman badan terhadap pekerja (*poenalie sanctie*) yang membuat mereka tidak tahan dan melarikan diri dengan memilih bekerja mandiri. Tetapi kenyataannya etnis Minangkabau tidak tertarik dengan kenyataan ini dan tetap bertahan dengan kemandiriannya masing-masing di berbagai sektor pekerjaan.

Sebagai kelompok masyarakat muslim yang identik dengan budaya merantau, ternyata keberadaan etnis Minangkabau di Tanah Deli bukan hanya persoalan dunia perdagangan tetapi juga keagamaan. Ada yang unik dari komposisi perantau Minangkabau ini karena rata-rata mereka adalah kelompok muslim modernis. Hal ini dikarenakan ketika masih di kampung halaman mereka sudah bersentuhan dengan organisasi Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Haji Rasul dan kawan-kawannya di Minangkabau. Kondisi ini semakin mulus ketika para perantau Minangkabau ini juga merintis pendirian Muhammadiyah di Tanah Deli pada tahun 1927 yang juga berpayung kepada kantor pusat Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Karena berpaham keagamaan yang modernis keberadaan Muhammadiyah tidak mendapat dukungan politik dari pemerintah lokal Melayu. Rata-rata mereka para perantau dari Minangkabau itu ternyata kemudian bergabung di Muhammadiyah

Sumatera Timur. Sehingga saat itu muncul anggapan jika Muhammadiyah Sumatera Timur tidak sekedar organisasi massa berbasis keagamaan tetapi juga terkesan menjadi “organisasi paguyuban” perantau Minangkabau di Tanah Deli.

Etnis pendatang lain yang kemudian menjadi “pesaing” bagi kelompok Minangkabau adalah Mandailing. Berbeda dengan Minangkabau ternyata etnis Mandailing cukup mendapat tempat di hati para sultan Deli. Hal ini dikarenakan mereka adalah kelompok terpelajar, mau berakulturasi dengan masyarakat Melayu, tidak “genit” dalam urusan politik Melayu, dan yang paling penting mereka memiliki pemahaman keagamaan bercorak tradisional yang sama dengan Kesultanan Melayu. Ketika mereka mendirikan organisasi Al-Jam’iyatul Washliyah tahun 1930 sultan memberikan dukungan. Apalagi organisasi ini dalam AD/ART nya menegaskan bahwa: perkumpulan ini berazaskan Islam, dalam hukum fiqh bermadzhab Syafi’i dan dalam i’tiqad ahlussunnah wal jama’ah (Sulaiman, 1956: 342). Ini semua kemudian menjadi “modal” bagi etnis Mandailing mendapatkan tempat yang bagus di hadapan sultan. Bahkan pemerintah kerajaan menilai sudah selayaknya mereka memegang otoritas keagamaan (Bahri, 2023: 68).

Karena sudah demikian adanya maka ketika itu ada polarisasi antara kedua etnis tersebut di hadapan Kesultanan Melayu. Minangkabau dengan Muhammadiyahnya dan Mandailing dengan Al-Washliyahnya. Meskipun demikian kolaborasi antara Melayu dan Mandailing dalam menghadapi Minangkabau tidaklah segampang yang dipikirkan. Pandangan ini ternyata sama dengan pandangan pemerintah kolonial Belanda tentang etnis Minangkabau dengan Muhammadiyahnya. Pemerintah kolonial menilai bahwa Muhammadiyah di Sumatera berbeda dengan di Jawa yang lebih moderat. Salah satu alasannya banyak aktivis di Minangkabau yang melarikan diri ke Tanah Deli akibat gejolak politik tahun 1926 dan saluran pelariannya adalah ke organisasi Muhammadiyah di Sumatera Timur. Apalagi kebanyakan pemimpin Muhammadiyah sudah dididik di sekolah-sekolah Islam dan memiliki pengalaman yang luas dalam beberapa partai politik radikal misalnya Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) (Pelly, 2017: 88).

Khusus dengan Mandailing meskipun ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar, tetapi sebagai sesama penganut agama Islam ternyata pada suatu ketika kedua kelompok ini memiliki titik temu. Beberapa titik temu tersebut antara lain sama-sama menolak kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang ingin menerapkan sistem ordonansi guru. Selain itu yang menjadi titik temu sehingga menjadi kesepahaman antara Minangkabau dengan Mandailing adalah upaya mereka menjadi benteng aqidah bagi umat Islam dari gempuran para missionaris yang tidak sedikit jumlahnya. Apalagi kelompok ini mendapat sokongan dari pemerintah Hindia Belanda (Bahri, 2023: 103).

Terlepas dari berbagai dinamika yang ada antara perantau etnis Minangkabau dengan kelompok lain di Tanah Deli tetapi sedikit banyaknya mereka sudah banyak mewarnai kehidupan di tengah masyarakat. Salah satu yang terpenting adalah dari sisi keagamaan dengan banyaknya muncul para ulama yang memiliki nama besar dari internal etnis Minangkabau sepanjang abad 20 M. Mereka banyak berkiprah di tengah masyarakat sejak era kolonial sampai kemerdekaan Indonesia. Jika ditelisik para ulama ini tidak hanya sebagai pendakwah dalam arti yang formal tetapi ada juga yang aktif mengembangkan pendidikan, pers, akademisi, maupun perniagaan. Setidaknya tercatat ada sepuluh ulama Minangkabau yang memainkan peran pentingnya di Tanah Deli dari masa yang dimaksud. Mayoritas dari mereka adalah para ulama yang pernah aktif di organisasi Muhammadiyah.

1. Muhammad Bustami Ibrahim

Muhammad Bustami Ibrahim atau yang dikenal dengan nama Bustami Ibrahim saja. Lahir di Bukittinggi tanggal 12 Desember 1907. Kehidupan kecilnya dihabiskan di kota Binjai karena ayahnya Ibrahim Sutan Said adalah seorang pedagang di sana. Selepas menempuh pendidikan dasar di Binjai, pada tahun 1926 Bustami Ibrahim memutuskan untuk belajar agama ke Makkah tepatnya di Madrasah Shaulatiyah. Madrasah ini dikenal sebagai tempat destinasi para pelajar dari kalangan Melayu. Tahun 1933-1935 sepulang dari Makkah Bustami Ibrahim menjadi guru di Bukittinggi. Semasa di Bukittinggi inilah ia mulai melihat organisasi Muhammadiyah dari jarak dekat dengan tokohnya Syaikh

Muhammad Djamil Djambek. Sepulangnya ke Medan tahun 1935 Bustami Ibrahim menjadi guru agama di Holland Indische School (HIS) dan Noormal School milik Muhammadiyah dan juga menjadi guru agama di sekolah MULO milik pemerintah (MUI Sumatera Utara, 1983: 28).

Pada masa kependudukan Jepang dimana banyak gerakan organisasi massa yang lumpuh dan bahkan partai politik dibubarkan. Ternyata dengan segala keterbatasan yang ada Bustami Ibrahim yang berkolaborasi dengan Hamka terus mengupayakan agar Muhammadiyah yang mereka bina bisa survive dalam pengembangan dakwahnya di tengah masyarakat. Pada zaman Jepang ternyata Bustami Ibrahim ternyata juga masih sempat mengajar di sekolah menengah seperti Kogyo Gakko (pertanian), Nagyo Gakko (industri), dan Tjo Gakko (umum). Selain itu juga pernah menjadi pegawai yang menangani pendidikan agama (Panggabean, 2018: 41).

Pada perjalanannya selain aktif di Muhammadiyah ternyata Bustami Ibrahim ia juga aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara. Bustami Ibrahim pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Djawatan Agama Daerah Sumatera Timur (1950-1952), Kepala Kantor Pendidikan Agama Sumatera Utara (1952-1954), Kepala Inspeksi Pendidikan Wilayah I Sumatera Utara dan Direktur Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (1954-1957) di Medan. Sebagai akademisi Bustami Ibrahim banyak mengajar di berbagai kampus di Medan seperti Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Tjut Nyak Dhien (UTND), dan puncaknya sebagai rektor di UMSU. Beberapa karya tulis dari Bustami Ibrahim antara lain Renungan Hidup, Modernisasi dalam Islam, Ichdisar Agama-Agama Besar di Dunia, Penuntun Agama, Al-Achlaq, Fathimah 1000 Tahun, Budi Pekerti dalam Diri dan Masyarakat dan Moralisasi.

2. Haji Abdul Malik Karim

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan nama Hamka. Lahir di Maninjau tanggal 17 Februari 1908 dan merupakan anak dari ulama besar Minangkabau Syaikh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul). Pendidikan formalnya tergolong sangat rendah karena tidak sampai tamat sekolah dasar HIS di Maninjau. Tahun 1927 ia memutuskan untuk meninggalkan Maninjau berangkat ke Makkah melalui Belawan bersama

jama'ah haji dari Indonesia. Ketika itu dari kepulauan Indonesia tercatat tidak kurang dari 64.000 yang berangkat haji (Hamka, 2018: 78). Di Makkah ia belajar agama dan bekerja di perusahaan percetakan milik keluarga Hamid Kurdi (mertua dari Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi). Sebelum tinggal di Tanah Deli Hamka pernah menjadi Konsul Muhammadiyah di Padang Panjang dan pendakwah utusan Muhammadiyah di Ujung Pandang (Makassar).

Awal tahun 1936 Hamka hijrah ke Medan dan tetap aktif di organisasi Muhammadiyah cabang Sumatera Timur. Ia juga menjadi penulis di majalah Pedoman Masyarakat. Ditangan Hamka majalah ini berkembang pesat dengan berbagai pembaca yang tersebar di kepulauan Indonesia dan Malaya. Kehadirannya memang bertepatan dengan tumbuh suburnya kehidupan pers di Tanah Deli. Berbagai koran dan majalah ternama telah mewarnai bacaan masyarakat di sana. Tercatat sebelumnya sudah ada beberapa surat kabar besar seperti *Pewarta Deli* (terbit sejak tahun 1910), *Benih Merdeka* (terbit sejak tahun 1916), *Perempoean Bergerak* (terbit sejak tahun 1919), *Sinar Deli* (terbit sejak tahun 1926) dan lain sebagainya (Bahri, 2023: 42).

Pada tahun 1941 dalam sebuah rapat di Binjai Hamka terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur menggantikan Muhammad Said Harahap yang meninggal pada tahun 1939. Hanya saja ia menghadapi cobaan yang sangat berat karena setahun kemudian Jepang datang ke Indonesia. Ketika itu Jepang yang terdesak Perang Dunia II menerapkan pemerintahan yang militeristik sehingga seluruh partai politik dibubarkan dan organisasi massa diawasi secara ketat. Meskipun demikian Hamka sempat menjadi dewan perwakilan rakyat semasa Jepang yang disebut dengan *Chuo Sangi In* yang membuat hubungannya dengan pihak Jepang kian erat. Kiprah Hamka mulai pudar seiring dengan berakhirnya kekuasaan Jepang tahun 1945.

3. Mahyaruddin Salim

Mahyaruddin Salim yang lahir di Medan pada bulan April tahun 1912. Orang tuanya berasal dari Sungai Taleh, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam saat ini. Ayahnya Muhammad Salim bergelar *Datuk Pandu Kualam* adalah seorang ambtenaar era kolonial Belanda. Mahyaruddin Salim belajar

Islam dari ayahnya langsung yang juga seorang mubaligh di Tanah Deli. Oleh ayahnya ia dikirim ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Nagari Canduang, Sumatera Barat. Di Canduang ia berguru langsung kepada pendiri madrasah ini yaitu Syaikh Sulaiman Rasuli (1871-1970). Selepas mengikuti pendidikan di Canduang, Mahyaruddin Salim melanjutkan pendidikannya di Makkah.

Sepulang dari Makkah Mahyaruddin Salim aktif menjadi guru dan mubaligh di Tanah Deli. Di dekat rumahnya yang berada di kawasan Kota Matsum ia mendirikan Taman Pendidikan Islam dengan konsep seperti pesantren. Semasa pendudukan Jepang di Tanah Deli ia menjadi salah seorang ulama yang selalui dicurigai oleh Jepang dan hendak beberapa kali ditangkap. Begitu juga dalam perang mempertahankan kemerdekaan Mahyaruddin Salim mengambil peran sebagai gerilyawan dan bergabung dalam barisan lasykar Hizbullah. Mahyaruddin Salim adalah ulama yang masuk ke semua kalangan. Ini dibuktikan dengan perannya membentuk Muhammadiyah di Jalan Demak dan organisasi Perti di Medan.

Mahyaruddin Salim yang ahli dalam bidang tafsir Al-Qur'an dikenal sebagai orang yang keras dengan keberadaan Komunis pada masa Orde Lama. Begitu juga semasa Orde Baru ia kerap melontarkan kritik yang tajam kepada penguasa. Cakupan dakwahnya cukup luas di Sumatera Utara dan Aceh. Mahyaruddin Salim juga aktif memberikan ceramah agama melalui radio milik PT. Indo Hero di Medan. Kaset-kaset ceramahnya banyak mendapat sambutan masyarakat hingga ke Malaysia.

4. Joesoef Sou'yb

Joesoef Sou'yb kelahiran Bayur, Maninjau tahun 1928 yang dikenal pakar dalam kajian filsafat dan ilmu perbandingan agama. Pernah menempuh pendidikan di Government School di Langsa dan Sumatera Thawalib. Ia juga pernah belajar Islam di perguruan Tarbiyah Islamiyah Bukittinggi. Ketika hijrah ke Medan Joesoef Sou'yb kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Sejak awal ia sudah aktif di pers sehingga Joesoef Sou'yb pernah didaulat menjadi pengajar di Akademi Pers Indonesia Medan (1959-1963). Kemudian mengajar di Fakultas Ushuluddin UMSU (1967-1993), dan IAIN Sumatera Utara (1980-1993). Sebagai ahli perbandingan agama Joesoef Sou'yb begitu menguasai Al-Qur'an dan Bible.

Joesoef Sou'yb tidak bisa dilepaskan dari dunia pers karena pernah memimpin beberapa surat kabar dan majalah. Sebut saja ada Dunia Pengalaman, Lukisan Poedjangga, Penontoen Peodjangga, Bintang Medan, Waktu dan Warta Berita, dan Harian Lembaga Medan. Puluhan tulisannya beredar di berbagai media massa begitu pula puluhan bukunya sudah beredar luas di tengah masyarakat. Oleh karenanya banyak pihak yang menempatkan Joesoef Sou'yb sebagai salah satu tokoh pers di Tanah Deli. Dalam corak intelektualnya Joesoef Sou'yb tiga pola yakni theologis, falsafati, dan kesejarahan. Karena berpangkal dari yang demikian maka karyanya betul-betul radikal, universal, dan sistematis (Sukiman, 2014:31).

5. Mansyur Luthan

Mansyur Luthan kelahiran Bukittinggi 5 Oktober 1921. Ia mendapatkan pendidikan dasar keagamaan dari orang tuanya dan menempuh pendidikan di perguruan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Ia adalah pensiunan pegawai Kantor Departemen Agama di kota Medan tahun 1980. Sejak awal Mansyur Luthan sudah aktif di gerakan Muhammadiyah ketika ia menjadi guru di SPG Mu'allimin Muhammadiyah. Pada masa Orde Lama ia termasuk ulama yang keras menentang keberadaan ideologi Komunis yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Tahun 1970 an Mansyur Luthan menjadi pengajar pada kajian hadits di kampus UMSU Medan, dimana salah satu rekannya adalah Joesoef Sou'yb seorang ulama ahli filsafat dan perbandingan agama. Pernah pula menjabat sebagai Kepala Panti Asuhan Putra PKU Muhammadiyah Medan. Kariernya di Muhammadiyah terus menanjak sampai mendapat amanah sebagai Ketua PD Muhammadiyah Kota Medan. Ditingkat Provinsi ia pernah diamanahi menjadi Ketua Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Sumatera Utara dan Wakil Ketua III PW Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Saldin Saleh

Saldin Saleh kelahiran Kampung Padusunan, Pariaman tanggal 10 Juli 1923 yang akrab disapa Buya Saldin. Di Minangkabau ia menempuh pendidikan di Volk School tingkat dasar dan Perguruan Islam Sumatera Thawalib sampai tahun 1942. Dari Minangkabau ia pindah ke pulau Jawa tepatnya ke Jakarta dan Yogyakarta serta sempat pula menuntut ilmu di

Islamic College sampai tahun 1945. Pada masa revolusi fisik Saldin Saleh aktif berjuang bersama pasukan Sabilillah mempertahankan kemerdekaan sebagai Ketua Seksi Komando Pelajar untuk memperkuat pertahanan.

Tahun 1953 Saldin Saleh pindah ke Medan dan berprofesi sebagai tukang jahit disamping menjadi guru dan mubaligh. Saldin Saleh mengajar di Sekolah Mu'allimin Muhammadiyah Medan dalam bidang fiqh dan sejarah. Pernah pula masuk ke dalam organisasi Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan menjadi pengurus Masyumi Kota Medan. Di jajaran Muhammadiyah Sumatera Utara ia merupakan salah satu tokoh penting pada zamannya disamping tokoh lainnya seperti Abdul Mu'thi, Kamarisah Tahar, Hamzah Meuraxa, Mansyur Luthan, maupun N. D. Pane. Dalam bidang politik selain di Masyumi Saldin Saleh pernah masuk ke dalam Partai Parmusi tahun 1968 dan pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Utara era reformasi. Beberapa muridnya yang menjadi tokoh penting di masyarakat ada Prof. Djanius Djamin (mantan ketua DPRD Medan dan rektor IKIP Medan), H. Nasril Bahar (anggota DPR RI), Ibrahim Sakti Batubara (mantan anggota DPRD Sumut), dan Ustadz Dalmi Iskandar (tokoh Muhammadiyah Sumatera Utara).

7. Djamaluddin Ahmad

Djamaluddin Ahmad kelahiran Bukittinggi tanggal 2 Agustus 1923 dari pasangan Ahmad Datuk Bendaharo Diateh dan Chadijah Koto. Menempuh pendidikan di Perguruan Tarbiyah Islamiyah Ampek Angkek, Canduang, Bukittinggi. Pada tahun 1942-1950 ia menjadi guru di Malaysia kemudian di Bukittinggi. Selepas menjadi guru ia menjadi pegawai di Kanwil Departemen Penerangan Sumatera Tengah yang berkedudukan di Pekanbaru. Tahun 1947-1957 Djamaluddin Ahmad juga menjadi pengurus Masyumi di Riau. Tahun 1950 an Djamaluddin Ahmad bergabung dengan gerakan PRRI bersama Mohammad Natsir di Sumatera Barat sebagai bentuk protes keras atas gaya kepemimpinan Bung Karno yang dinilai sudah banyak menyimpang. Di PRRI ia menjadi salah satu staf Perdana Menteri PRRI Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Tahun 1961 selepas aktif di PRRI ia pindah ke Medan bekerja di Serikat Pekerja dan menjadi mubaligh. Ia berperan dalam pendirian Perguruan Islam Al-Ulum di Medan tahun 1960 an dan menjadi pengurus Yayasan Al-Jihad

sampai tahun 1982. Pasca bubarnya Masyumi tahun 1960 Mohammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dimana untuk pengurus Sumatera Utara diamanahkan kepada Djamaluddin Ahmad. Ia menggerakkan Dewan Dakwah dalam rangka pengiriman tenaga dakwah ke berbagai kawasan di pedalaman Sumatera Utara. Meskipun sebagai orang Minangkabau yang identik dengan organisasi Muhammadiyah dan pernah pula menjadi pengajar di UMSU Medan tetapi Djamaluddin Ahmad memilih tidak menjadi kader Muhammadiyah. Djamaluddin Ahmad terkenal dengan prinsipnya terlebih dahulu menjalankan agama baru mengajarkannya. Ia termasuk mubaligh yang masuk ke dalam berbagai golongan masyarakat.

8. Anas Nurdin

Anas Nurdin lahir di Bukittinggi tahun 1936 pasangan Nurdin dan Rafah. Anas Nurdin sempat menuntut ilmu di Perguruan Islam Sumatera Thawalib tetapi kemudian tahun 1950 an pindah ke Medan dan menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah UISU. Sebelumnya ia adalah seorang pegawai negeri tetapi akhirnya memutuskan mundur. Ia adalah seorang guru di STM Medan dan Perguruan Al-Ulum. Sekalipun sebagai orang Minangkabau ternyata Anas Nurdin tidaklah masuk ke dalam Muhammadiyah tetapi ia tetap bisa diterima pada pengajian-pengajian yang diselenggarakan Muhammadiyah di Medan.

Disamping sebagai mubaligh ternyata Anas Nurdin adalah ulama yang berprofesi sebagai pedagang tepatnya di Pusat Pasar Medan. Ia berperan penting dalam membentuk Koperasi UBERMUSI (Usaha Bersama Muslim Indonesia) yang bertujuan untuk memberikan pinjaman bagi pedagang muslim tanpa harus terikat dengan riba seperti kalangan penjahit, penjual kain, atau makanan. Karena saat itu sedang merebaknya para pedagang yang memproleh pinjaman modal dari para rentenir. Anas Nurdin juga menjadi pelopor pendirian Masjid Pusat Pasar yang saat itu rintangannya cukup banyak.

9. Firdaus Naly

Firdaus Naly kelahiran Bukittinggi tanggal 15 November 1944 dari pasangan Naly Sutan Perpatih dan Maimudah. Ia menempuh pendidikan di SR Banuhampu, Agam, PGA 4 Tahun di Bukittinggi, dan PGA 6 Tahun di Padang. Pendidikan formal agama diprolehnya

dari perguruan Sumatera Thawalib. Tahun 1960 an Firdaus Naly menempuh pendidikan di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta. Setamat dari PHIN ia menghabiskan waktu sebagai pegawai negeri di jajaran Kanwil Departemen Agama Sumatera Utara. Semasa menjalani tugas di Departemen Agama Firdaus Naly berhasil menyelesaikan pendidikannya di Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sumatera Utara pada tahun 1981. Adapun puncak kariernya di lembaga ini adalah ketika menjadi Kepala Kanwil Departemen Agama Sumatera Barat tahun.

Selain sebagai pegawai negeri Firdaus Naly juga aktif di organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1986 ia ditetapkan sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PW Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 1991 terpilih sebagai sekretaris mendampingi Drs. H. M. Yamin Lubis. Pada Musywil ke VIII di Sibolga ia terpilih menjadi Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara periode 1995-2000 melalui penetapan dari PP Muhammadiyah. Akan tetapi ini tidak jalankannya sampai selesai karena harus bertugas menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Sumatera Barat pada tahun 1997-2000. Beberapa kadernya yang saat ini menjadi tokoh di masyarakat ada Dalail Ahmad (mantan Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara), Amirsyah Tambunan (mantan Sekjend MUI Pusat), Nur Bahdin Tanjung (mantan Rektor UMSU), Agussani (rektor UMSU), dan Hasyimsyah Nasution (Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara).

CONCLUSION

Perkembangan kota Medan atau Tanah Deli sejak abad 20 M tidak terlepas dari dampak kebijakan politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan sistem ekonomi terbuka tahun 1870 sebagai pengganti sistem tanam paksa yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Regulasi yang dibuat mengisyaratkan adanya keterbukaan ekonomi yang tadinya hanya dimonopoli oleh pemilik modal dari Belanda bertambah dari bangsa-bangsa lain. Salah satu yang menerima pengaruh secara signifikan adalah kawasan Sumatera Timur terkhusus di Tanah Deli terutama dari sektor perkebunan dalam jumlah besar hingga Tanah Deli dijuluki negeri petro dollar.

Perkembangan ekonomi di Tanah Deli telah menjadi magnet yang menarik berbagai elemen masyarakat untuk mengadu nasib di

Tanah Deli. Salah satu kelompok perantau yang dimaksud adalah etnis Minangkabau yang dikenal dengan budaya merantau dan aktif di perniagaan. Mayoritas mereka para perantau adalah orang-orang yang sudah bersentuhan dengan organisasi Muhammadiyah. Sehingga ketika di Tanah Deli tampilan keagamaannya juga bercorak modernis. Para perantau Minangkabau itu juga menjadikan Muhammadiyah sebagai wadah pertemuan mereka sesama orang Minangkabau di Tanah Deli. Dampaknya ini memunculkan anggapan kalau Muhammadiyah adalah Minangkabau Sentris. Muhammadiyah di Tanah Deli tidak sepenuhnya mendapat dukungan politik baik dari Kesultanan Melayu maupun pemerintah kolonial Belanda.

Nasib orang Minangkabau yang melekat dengan Muhammadiyahnya ternyata berbeda dengan pendatang lain terutama Mandailing. Etnis ini dikenal sebagai kelompok muslim terpelajar, bisa berakulturasi, tidak membahayakan politik Kesultanan Melayu, dan memiliki corak keagamaan yang sama dengan pihak penguasa Tanah Deli. Mereka mendapat tempat yang cukup terhormat dari penguasa lokal yang ini tidak bisa didapatkan oleh kelompok etnis Minangkabau. Apalagi kelompok Mandailing pada tahun 1930 juga membentuk organisasi bernama Al-Jam'iyatul Washliyah yang memperkuat legitimasi penguasa lokal terhadap keberadaan etnis Mandailing.

Meskipun demikian fakta sejarah telah membuktikan bahwa etnis Minangkabau ini telah menjadi kelompok masyarakat yang sangat banyak mewarnai sejarah Tanah Deli abad 20 khususnya dalam bidang keagamaan. Banyak ulama-ulama di Tanah Deli bermunculan dari internal etnis Minangkabau yang kiprahnya besar di tengah masyarakat. Mayoritas mereka menjadi berafiliasi dan menjadi pengurus di organisasi Muhammadiyah atau setidaknya pernah bersentuhan dengan Muhammadiyah. Dari sembilan ulama yang ada tercatat yang aktif secara total di Muhammadiyah ada Bustami Ibrahim, Hamka, Mansur Luthan, Saldin Saleh, dan Firdaus Naly. Kemudian yang pernah bersentuhan dengan Muhammadiyah ada Mahyaruddin Salim, Joesoef Sou'yb, dan Anas Nurdin. Kemudian yang tidak berafiliasi ke Muhammadiyah adalah Djamiluddin Ahmad..

REFERENCE LIST

- Bahri, Samsul. 2022. Tanoh Alas Negekhi Metuah. Medan: Gema Ihsani
- Bahri, Samsul. 2023. Ulama Mandailing dalam Pentas Sejarah Tanah Deli. Medan: Prokreatif
- Bahri, Samsul. 2023. Buya Hamka di Kota Medan (1936-1942). Medan: Prokreatif
- Ilham Iskandar Zein, dkk. 2021. Memoar Kesultanan Negeri Langkat. Medan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut
- Lukman, Tengku Sinar Basarshah. 2010. Kedatangan-Kedatangan Imigran-Imigran China ke Pantai Timur Sumatera Abad ke 19. Medan: Forkala Sumut
- MUI Sumatera Utara. 1983. Sejarah Ulama-Ulama terkemuka di Sumatera Utara. Medan: IAIN Al-Jami'ah Sumt
- Nurdin, Amin dan Ahmad Rido. 2020. Identitas dan Kebanggaan: Menjadi Orang Minangkabau. Ciputat: HIPIUS
- Pelly, Usman. 2017. Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabu dan Mandailing di Perkotaan. Medan: Casa Mesra
- Rahman, Abd Madjid dan Muhammad Saleh Madjid. 2011. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Ombak
- Saputra, Hadi Panggabean. 2018. Pemikiran H.M. Bustami Ibrahim tentang Budi Pekerti . Medan: Pps UIN Sumatera Utara
- Sukiman. 2014. Pemikiran Theologi Islam Modern Joesoef Sou'yb. Medan: IAIN Press
- Sulaiman, Nukman. 1956. 1/4 Abad Al-Djam'iyatul Washliyah. Medan: PB. Al-Washliyah